
**KEBIJAKAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN**

Farantika Dwi Hardini¹, Anggi Kristiana Joy P², Benita Lidya Maharani³, Achmad Rizky Airlangga⁴, Cantika Asnanti⁵
farantikahardini@gmail.com¹, anggikristiana019@gmail.com², benitalidyaaa@gmail.com³,
achmad.rangga12@gmail.com⁴, cacaasnanti@gmail.com⁵
Universitas Tidar

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu masalah di Indonesia. Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan banyak faktornya. perpajakan memiliki potensi besar mengatasi kemiskinan. Melalui sistem pajak yang adil dan efektif, pemerintah membuat program yang membantu masyarakat miskin. Namun, banyak tantangan yang berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, diperlukan analisis hubungan kebijakan pajak dan upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan artikel online. Dengan melakukan studi kasus terhadap negara lain yang berhasil mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan pajak yang efektif. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan agar tetap relevan dan efektif. Diperlukan kebijakan progresif untuk memastikan beban pajak adil dan tidak memberatkan masyarakat yang rentan miskin.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pajak, Kebijakan.

Abstract

Poverty is one of the problems in Indonesia. The causes of poverty are very complex and have many factors. taxation has great potential to overcome poverty. Through a fair and effective tax system, the government creates programmes that help the poor. However, there are many challenges that impact on poverty alleviation efforts. Therefore, it is necessary to analyse the relationship between tax policy and poverty alleviation efforts. This research uses literature studies sourced from scientific journals, books, research reports, and online articles. By conducting case studies of other countries that have successfully reduced poverty levels through effective tax policies. The government needs to review the policy to keep it relevant and effective. Progressive policies are needed to ensure that the tax burden is fair and does not burden the vulnerable poor.

Keyword: Poverty, Tax, Policy.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Kebijakan perpajakan memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi kemiskinan. Melalui sistem pajak yang adil dan efektif, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang dapat membantu masyarakat miskin. Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan dan praktik penghindaran pajak. Selain itu, kebijakan pajak yang tidak progresif

juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi karena beban pajak lebih banyak ditanggung oleh masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pajak dan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat miskin.

Di sisi lain, kebijakan pajak yang terlalu berat juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang pada akhirnya dapat memperburuk kemiskinan. Penting bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mengumpulkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pajak juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk program-program yang dapat membantu masyarakat miskin. Peran lembaga pengawas dan pengontrol seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan pajak sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, muncul tantangan baru dalam hal perpajakan. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan perpajakannya agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kemiskinan di era modern. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kompleksitas masalah kemiskinan dan peran kebijakan pajak dalam mengatasinya, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pembahasan kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan langkah awal dalam mengumpulkan informasi dan data terkait kebijakan pajak dan kemiskinan di Indonesia. Melalui pencarian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan artikel online, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik tersebut. Analisis terhadap kebijakan pajak yang telah diterapkan di Indonesia dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dapat menganalisis jenis-jenis pajak yang ada, besaran tarif pajak, serta efektivitas kebijakan pajak dalam mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini melakukan studi kasus terhadap negara-negara lain yang telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan pajak yang efektif. Dengan mempelajari kasus-kasus sukses tersebut dapat menemukan insight dan pelajaran berharga yang dapat diterapkan di Indonesia. Penggunaan data statistik terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga riset terkait untuk mendukung argumen dalam makalah ini. Data statistik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia serta dampak kebijakan pajak terhadap pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini juga menganalisis perbandingan antara kebijakan pajak di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki tingkat kemiskinan rendah. Dengan melakukan perbandingan ini tentunya dapat mengevaluasi kelemahan dan kelebihan kebijakan pajak yang ada serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Dan tak kalah penting, melakukan tinjauan terhadap aspek hukum dan regulasi terkait kebijakan pajak di Indonesia. Dengan memahami landasan hukum yang mengatur perpajakan, dapat mengetahui kendala-kendala yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan pajak untuk mengurangi kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pajak Guna Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui kebijakan pajak yang adil dan efektif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di

bawah garis kemiskinan. Faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketimpangan distribusi kekayaan menjadi penyebab utama kemiskinan. Kebijakan pajak memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi kemiskinan. Melalui sistem pajak yang adil, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang dapat membantu masyarakat miskin.

Di Indonesia, masih banyak tantangan dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan dan praktik penghindaran pajak menjadi kendala utama. Kebijakan pajak yang tidak progresif dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi, karena beban pajak lebih banyak ditanggung oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat memperparah kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pajak dan pengentasan kemiskinan. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat miskin. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara mengumpulkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini penting untuk mengurangi kemiskinan.

Transparansi dalam pengelolaan dana pajak adalah kunci untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk program-program yang dapat membantu masyarakat miskin. Selain itu, peran lembaga pengawas dan pengontrol seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan pajak sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, muncul tantangan baru dalam hal perpajakan. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan perpajakannya agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi kemiskinan di era modern. Kebijakan pajak yang terlalu berat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang pada akhirnya dapat memperburuk kemiskinan. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga merupakan langkah yang tepat dalam mengurangi kemiskinan. Edukasi perpajakan perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin sadar akan kewajibannya. Perlu adanya kebijakan pajak progresif yang diterapkan untuk memastikan beban pajak lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat yang memang sudah rentan miskin.

Pemerintah perlu terus berinovasi dalam merancang kebijakan perpajakan yang berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan. Kebijakan pajak yang cerdas dan efektif dapat menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan. Pentingnya sinergi antara kebijakan pajak dengan program-program sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, dana pajak yang terkumpul harus dialokasikan secara tepat untuk program-program yang dapat membantu masyarakat miskin. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan pajak dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan.

Selain pemerintah, pihak swasta juga memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan melalui kontribusi pajak dan kerja sama internasional juga dapat menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pertukaran pengalaman dan sumber daya. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan pajak antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan, menerapkan kebijakan pajak yang progresif, transparansi dalam pengelolaan dana pajak, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan.

Jenis-Jenis Kebijakan Pajak Yang Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Kemiskinan Serta Cara Kerjanya

Adapun Jenis-jenis kebijakan pajak yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan cara kerjanya yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Langsung: Pajak langsung adalah jenis pajak yang dipungut secara langsung dari wajib pajak. Pajak langsung dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang dapat membantu masyarakat miskin. Contohnya, pajak penghasilan (PPH) dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial seperti program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi, dan program pendidikan;
2. Pajak tidak langsung: Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak tidak langsung dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui modal investasi yang akan membantu masyarakat miskin. Sebagai contoh, pajak impor dapat digunakan untuk mengurangi harga barang-barang impor yang penting bagi masyarakat miskin, seperti barang-barang kesehatan dan pendidikan;
3. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial lokal yang dapat membantu masyarakat miskin. Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial seperti program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi, dan program pendidikan;
4. Pajak tidak langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh wajib pajak. Pajak tidak langsung dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang membantu masyarakat miskin. Sebagai contoh, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial seperti program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi, dan program pendidikan;
5. Pajak Progresif: Pajak progresif adalah jenis pajak yang memiliki sistem pengumpulan dana berdasarkan tingkat kekayaan atau pendapatan. Pajak progresif dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang dapat membantu masyarakat miskin. Sebagai contoh, pajak penghasilan berdasarkan pendapatan atau pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial seperti program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi, dan program pendidikan;
6. Pajak yang dipaksakan (Involuntary Taxes): Pajak paksa adalah jenis pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur harga atau kondisi yang diperlukan untuk mengatur suatu industri atau sektor. Pajak paksa dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang membantu masyarakat miskin. Sebagai contoh, pajak penjualan atas barang-barang kesehatan dan pendidikan dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial seperti program bantuan sosial, program pembangunan ekonomi, dan program pendidikan.

Cara kebijakan pajak dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang dapat membantu masyarakat miskin. Pemerintah dapat mengumpulkan dana dari pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak daerah, pajak tidak langsung, pajak progresif, dan pajak paksa. Dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak, pemerintah dapat membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial yang diperlukan, seperti program bantuan.

Contoh Konkret Mengenai Kebijakan Pajak Yang Berhasil Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Salah satu contoh kebijakan pajak yang berhasil mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah pajak daerah. Pajak daerah dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin

dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang dapat membantu masyarakat miskin. Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial seperti program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi, dan program pendidikan. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia memfokuskan anggaran negara untuk membiayai infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah di Indonesia dengan tetap mempertahankan manajemen pajak yang transparan dan efektif. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerapkan pajak bermasalah yang merupakan pengentas kemiskinan, yaitu pajak penghasilan atas pengeluaran hasil pertanian. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menggunakan pajak tidak langsung sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dapat digunakan untuk mengurangi harga barang mewah yang penting bagi masyarakat miskin, seperti barang kesehatan dan pendidikan. Pengelolaan pajak diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara. Kontraprestasi pembayaran pajak secara tidak langsung sehingga wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu.

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pajak yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia:

1. Pajak daerah: Pajak daerah dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk program-program sosial yang dapat membantu masyarakat miskin. Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui program-program sosial seperti program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi, dan program pendidikan;
2. Pajak bermasalah: Pemerintah Indonesia menerapkan pajak masalah untuk mengurangi kemiskinan, yang merupakan pajak penghasilan atas pengeluaran produk pertanian;
3. Pajak tidak langsung: Pajak tidak langsung seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dapat digunakan untuk mengurangi harga barang mewah yang penting bagi masyarakat miskin, seperti barang kesehatan dan pendidikan;
4. Manajemen pajak yang transparan dan efektif: Pemerintah Indonesia telah memfokuskan anggaran negara untuk membiayai infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap menjaga pengelolaan pajak yang transparan dan efektif;
5. Manajemen pajak yang mengurangi kemiskinan: Pengelolaan pajak diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan di suatu negara. Kontraprestasi pembayaran pajak secara tidak langsung sehingga wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat.

SIMPULAN

Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi masalah utama. Kebijakan pajak yang adil dan efektif dianggap sebagai salah satu solusi untuk menguranginya. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran perpajakan dan praktik penghindaran pajak perlu diatasi. Diperlukan analisis mendalam untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Transparansi dalam pengelolaan dana pajak dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan sangat penting. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan kerja sama internasional juga diperlukan untuk mencapai pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pajak yang lebih baik.

Adapun Jenis-jenis kebijakan pajak untuk mengatasi kemiskinan meliputi pajak langsung, tidak langsung, daerah, progresif, dan paksa. Kebijakan ini bertujuan untuk

mengumpulkan dana yang cukup untuk program sosial yang membantu masyarakat miskin. Misalnya, pajak penghasilan digunakan untuk program bantuan sosial. Dengan pendapatan dari pajak ini, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Beberapa kebijakan pajak berhasil mengurangi kemiskinan di Indonesia. Contohnya, pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, digunakan untuk program sosial. Pemerintah juga menerapkan pajak bermasalah untuk penghasilan produk pertanian. Pajak tidak langsung, seperti PPnBM, guna membantu mengurangi harga barang penting bagi masyarakat miskin. Manajemen pajak yang transparan dan efektif digunakan untuk membiayai infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan pajak yang tepat diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arviana, N (2015). Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengentasan Kemiskinan. Studi Pustaka.
- Dalimunthe, SM (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). ANALISIS DAMPAK PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA. *Journal of Development Economic and Social Studies*.
- Gunadi, A. (2017). Kebijakan Pajak dan Kemiskinan. Universitas Islam Sultan Agung.
- Martiadi, R (2015). PANDANGAN ELITE POLITIK TENTANG MAKNA PENDIDIKAN POLITIK: Penelitian kualitatif deskriptif pada elite partai politik., repository.upi.edu.
- Matitaputty, S, Sugiarto, A, & Hastuti, R (2020). Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat., repository.unika.ac.id.
- Mingxing LIU & Ran TAO (2020). Kebijakan Pajak "Asing" dan Pengembangan Ekonomi. STIE Indonesia.
- Nasozaro, HO (2018). Peranan Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, jurnal.dharmawangsa.ac.id.
- ZULLINI, RFS (2019). KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA GUNA MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM., repository.radenintan.ac.id.